



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/2232/KSP.00/70-74/04/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Koordinasi Pencegahan Korupsi Sektor Barang Milik Daerah (BMD)

29 April 2024

Yth. Sekretaris Daerah (daftar terlampir)

di

Tempat

Sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut “Undang-Undang KPK”), bahwa KPK mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mencegah korupsi di sektor barang milik daerah (BMD) melalui pengamanan hukum BMD melalui Program Sertifikasi Tanah BMD dan Penertiban Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, mohon berkenan Saudara untuk hadir serta menugaskan Inspektur dan kepala perangkat daerah terkait serta jajaran (daftar terlampir) untuk hadir pada acara koordinasi dan pertemuan yang akan dilaksanakan secara virtual (*Microsoft Teams*), pada:

1. Hari/Tanggal : Kamis/02 Mei 2024
Waktu : 08.30 – 12.00 WIB
Topik : Program Sertifikasi Tanah BMD di Jawa Tengah
Tempat : Ms. Teams
https://bit.ly/Sertifikasi_Jateng
Meeting ID: 474 442 848 052
Passcode: RmmRSU
2. Hari/Tanggal : Kamis/02 Mei 2024
Waktu : 13.30 – 16.30 WIB
Topik : Penertiban PSU Perumahan di Jawa Tengah
Tempat : Ms. Teams
https://bit.ly/PSU_Jateng
Meeting ID: 449 447 162 560
Passcode: biqYJc

Agar pelaksanaan koordinasi berlangsung efektif, dimohon kepada kepala perangkat daerah yang terkait atau jajaran untuk mengisi lembar "Pendataan Terkait Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah" dan lembar "Pendataan Terkait Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Umum oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah" sebagaimana format terlampir.

Untuk koordinasi lebih lanjut silakan menghubungi Sdr Azril Zah di nomor telepon 0812-869-4421 atau email azril.zah@kpk.go.id.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

a.n. Pimpinan

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi,
Komisi Pemberantasan Korupsi



Dokumen ini ditandatangani secara digital

Didik Agung Widjanarko

Tembusan:

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
2. Gubernur Jawa Tengah
3. Para Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jawa Tengah
4. Inspektur Komisi Pemberantasan Korupsi

Lampiran I

Surat Nomor : B/2232/KSP.00/70-74/04/2024

Tanggal : 29 April 2024

DAFTAR SEKRETARIS DAERAH

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
3. Pemerintah Kabupaten Banyumas
4. Pemerintah Kabupaten Batang
5. Pemerintah Kabupaten Blora
6. Pemerintah Kabupaten Boyolali
7. Pemerintah Kabupaten Brebes
8. Pemerintah Kabupaten Cilacap
9. Pemerintah Kabupaten Demak
10. Pemerintah Kabupaten Grobogan
11. Pemerintah Kabupaten Jepara
12. Pemerintah Kabupaten Karanganyar
13. Pemerintah Kabupaten Kebumen
14. Pemerintah Kabupaten Kendal
15. Pemerintah Kabupaten Klaten
16. Pemerintah Kabupaten Kudus
17. Pemerintah Kabupaten Magelang
18. Pemerintah Kabupaten Pati
19. Pemerintah Kabupaten Pekalongan
20. Pemerintah Kabupaten Pemalang
21. Pemerintah Kabupaten Purbalingga
22. Pemerintah Kabupaten Purworejo
23. Pemerintah Kabupaten Rembang
24. Pemerintah Kabupaten Semarang
25. Pemerintah Kabupaten Sragen
26. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
27. Pemerintah Kabupaten Tegal
28. Pemerintah Kabupaten Temanggung
29. Pemerintah Kabupaten Wonogiri
30. Pemerintah Kabupaten Wonosobo
31. Pemerintah Kota Magelang
32. Pemerintah Kota Pekalongan
33. Pemerintah Kota Salatiga
34. Pemerintah Kota Semarang
35. Pemerintah Kota Surakarta
36. Pemerintah Kota Tegal

a.n. Pimpinan

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi,
Komisi Pemberantasan Korupsi



Dokumen ini ditandatangani secara digital

Didik Agung Widjanarko

Lampiran II

Surat Nomor

: B/2232/KSP.00/70-74/04/2024

Tanggal

: 29 April 2024

**DAFTAR PESERTA
KOORDINASI PENCEGAHAN KORUPSI SEKTOR BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Kamis, 02 Mei 2024**

I. Program Sertifikasi Tanah BMD di Jawa Tengah

A. Pemerintah Daerah se Provinsi Jawa Tengah:

1. Inspektur
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Kepala Dinas Pendidikan
5. Kepala perangkat daerah yang menangani sertifikasi tanah milik Pemda
6. Kepala Bidang terkait

B. Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah :

1. Kepala Kantor Wilayah
2. Kepala Kantor Pertanahan
3. Kepala Bidang/Seksi terkait

II. Penertiban PSU Perumahan di Jawa Tengah

A. Pemerintah Daerah se Provinsi Jawa Tengah:

1. Kepala perangkat daerah yang menangani perumahan dan permukiman
2. Inspektur
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Kabid Aset

B. Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah :

1. Kepala Bidang yang terkait dengan pendaftaran tanah
2. Kepala Seksi di setiap Kantor Pertanahan yang terkait dengan pendaftaran tanah

a.n. Pimpinan

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi,

Komisi Pemberantasan Korupsi



Dokumen ini ditandatangani secara digital

Didik Agung Widjanarko

Lampiran III

Surat Nomor

: B/2232/KSP.00/70-74/04/2024

Tanggal

: 29 April 2024

**PENDATAAN TERKAIT SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	PEMERINTAH DAERAH	Bidang/Persil Tanah Milik Pemerintah Daerah						Rincian Bidang Tanah Belum Bersertifikat per 31 Desember 2023						Sertifikat Terbit: 1/1 - 31/3 2024 ⁷	
		Bidang/Persil Tanah ¹		Telah Bersertifikat per 31/12/2023 ²		Belum Bersertifikat per 31/12/2023 ³		Kategori 1 (Clean and Clear) ⁴		Kategori 2 (Clear but not Clean) ⁵		Kategori 3 (Not Clear but Clean & NCC) ⁶			
		Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Kabupaten Banjarnegara														
2	Kabupaten Banyumas														
3	Kabupaten Batang														
4	Kabupaten Blora														
5	Kabupaten Boyolali														
6	Kabupaten Brebes														
7	Kabupaten Cilacap														
8	Kabupaten Demak														
9	Kabupaten Grobogan														
10	Kabupaten Jepara														
11	Kabupaten Karanganyar														
12	Kabupaten Kebumen														
13	Kabupaten Kendal														
14	Kabupaten Klaten														
15	Kabupaten Kudus														
16	Kabupaten Magelang														
17	Kabupaten Pati														
18	Kabupaten Pekalongan														
19	Kabupaten Pemalang														
20	Kabupaten Purbalingga														
21	Kabupaten Purworejo														
22	Kabupaten Rembang														
23	Kabupaten Semarang														
24	Kabupaten Sragen														
25	Kabupaten Sukoharjo														
26	Kabupaten Tegal														
27	Kabupaten Temanggung														
28	Kabupaten Wonogiri														
29	Kabupaten Wonosobo														
30	Kota Magelang														
31	Kota Pekalongan														
32	Kota Salatiga														
33	Kota Semarang														
34	Kota Surakarta														
35	Kota Tegal														
	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	

KETERANGAN:

1. Jumlah seluruh bidang/persil tanah milik Pemda yang telah diinventarisir/diidentifikasi
2. Jumlah seluruh bidang/persil tanah milik Pemda yang telah terbit sertifikat (SHP/SHPL) sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

3. Jumlah seluruh bidang/persil tanah milik Pemda yang belum memiliki sertifikat (SHP/SHPL) sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
4. Jumlah seluruh bidang/persil tanah milik Pemda yang belum memiliki sertifikat (SHP/SHPL) dan berdasarkan hasil pengkategorian masuk dalam kategori *clean and clear*
5. Jumlah seluruh bidang/persil tanah milik Pemda yang belum memiliki sertifikat (SHP/SHPL) dan berdasarkan hasil pengkategorian masuk dalam kategori *clear but not clean*
6. Jumlah seluruh bidang/persil tanah milik Pemda yang belum memiliki sertifikat (SHP/SHPL) dan berdasarkan hasil pengkategorian masuk dalam kategori *clean but not clear* dan *not clean and not clear*
7. Jumlah seluruh bidang/persil tanah milik Pemda yang telah terbit sertifikat (SHP/SHPL) pada periode 1 Januari - 31 Maret 2024
8. Data dapat diisikan pada link https://bit.ly/KertasKerjaSertifikasiPSU_Jateng

a.n. Pimpinan

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi,
Komisi Pemberantasan Korupsi



Dokumen ini ditandatangani secara digital

Didik Agung Widjanarko

PENDATAAN TERKAIT PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) UMUM OLEH PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

NO	PEMERINTAH DAERAH	DESKRIPSI PROSES							PENYERAHAN PSU OLEH PENGEMBANG KEPADA PEMDA								
		Perda PSU ¹		Perkada PSU ²		Hasil Inventarisasi/Identifikasi PSU ³			Akumulasi Penyerahan Tahun 2023 ⁴			PSU Diserahkan Tahun 2024 ⁵			PSU Belum Diserahkan ⁶		
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Jumlah Lokasi/ Perumahan	Jumlah Unit PSU	Estimasi Nilai PSU (Rp)	Jumlah Lokasi/ Perumahan	Jumlah Unit PSU	Estimasi Nilai PSU (Rp)	Jumlah Lokasi/ Perumahan	Jumlah Unit PSU	Estimasi Nilai PSU (Rp)	Jumlah Lokasi/ Perumahan	Jumlah Unit PSU	Estimasi Nilai PSU (Rp)
1	Kabupaten Banjarnegara																
2	Kabupaten Banyumas																
3	Kabupaten Batang																
4	Kabupaten Blora																
5	Kabupaten Boyolali																
6	Kabupaten Brebes																
7	Kabupaten Cilacap																
8	Kabupaten Demak																
9	Kabupaten Grobogan																
10	Kabupaten Jepara																
11	Kabupaten Karanganyar																
12	Kabupaten Kebumen																
13	Kabupaten Kendal																
14	Kabupaten Klaten																
15	Kabupaten Kudus																
16	Kabupaten Magelang																
17	Kabupaten Pati																
18	Kabupaten Pekalongan																
19	Kabupaten Pemalang																
20	Kabupaten Purbalingga																
21	Kabupaten Purworejo																
22	Kabupaten Rembang																
23	Kabupaten Semarang																
24	Kabupaten Sragen																
25	Kabupaten Sukoharjo																
26	Kabupaten Tegal																
27	Kabupaten Temanggung																
28	Kabupaten Wonogiri																
29	Kabupaten Wonosobo																
30	Kota Magelang																
31	Kota Pekalongan																
32	Kota Salatiga																
33	Kota Semarang																
34	Kota Surakarta																
35	Kota Tegal																
	Jumlah					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KETERANGAN:

1. Jika sudah memiliki peraturan daerah yang terkait dengan Penyerahan PSU: nomor dan tanggal PSU

2. Jika sudah memiliki peraturan kepala daerah (peraturan bupati atau peraturan wali kota) yang terkait dengan PSU, turunan dari Perda PSU
3. Hasil inventarisasi atau identifikasi atas PSU yang telah dilakukan (paling update): berapa jumlah perumahan, jumlah unit PSU, dan nilai atau estimasi nilai PSU yang wajib diserahkan oleh pengembang kepada Pemda
4. Akumulasi PSU yang telah diserahkan oleh pengembang kepada Pemda per 31 Desember 2023: jumlah perumahan, jumlah unit PSU, dan nilai atau estimasi nilai PSU
5. Jumlah PSU yang telah diserahkan oleh pengembang kepada Pemda periode 1 jan - 31 Maret 2024: jumlah perumahan, jumlah unit PSU, dan nilai atau estimasi nilai PSU
6. Jumlah PSU yang belum diserahkan oleh pengembang kepada Pemda per 31 Maret 2024: jumlah perumahan, jumlah unit PSU, dan nilai atau estimasi nilai PSU
7. Data dapat diisikan pada link https://bit.ly/KertasKerjaSertifikasiPSU_Jateng

a.n. Pimpinan

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi,
Komisi Pemberantasan Korupsi



Dokumen ini ditandatangani secara digital

Didik Agung Widjanarko